

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Undang-undang di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang berfungsi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu lulusan (*output*) yang memiliki pengetahuan, kecakapan dan keahlian sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan sumberdaya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional merujuk pada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 8 standar yakni: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Salah satu indikator mutu pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar nasional yang ditetapkan di atas, diantaranya tersedia lahan yang cukup, gedung yang layak dan perlengkapan penunjang pembelajaran yang memadai. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Pendekatan ini menunjukkan perlunya perbaikan terus menerus pada berbagai komponen pendidikan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar perlu didukung oleh sarana prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Suti, 2011, hlm.2). Sarana prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu

diperlukan manajemen sarana prasarana melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. (Ariani, 2018, hlm.110).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016, mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem ini dikembangkan agar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

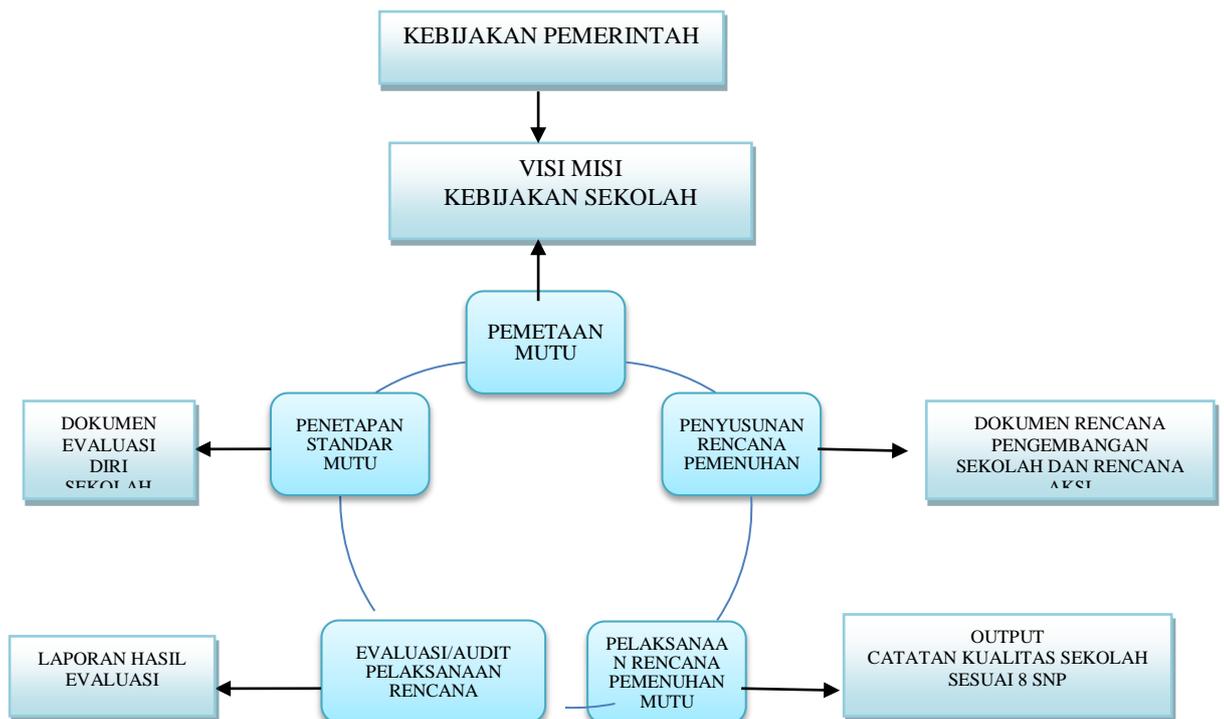
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik, berkelanjutan, holistik, dan terdokumentasi, sebagai berikut :

1. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
2. SPMI menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP
3. SPMI menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan.
4. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan membentuk suatu siklus.

5. SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.
6. Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut pedoman umum Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Siklus SPMI (Mulyono, 2019, hlm. 29)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah. Pelaksanaan pemenuhan mutu

baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan analisa strategi atau analisa manajemen yang efektif dan efisien. Zamroji (2019, hlm.200) mengemukakan bahwa analisa strategi sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal sekolah. Analisa terhadap lingkungan internal meliputi siswa, guru, sarana prasarana, kurikulum, materi pendidikan, proses belajar mengajar, adminitrasi dan keuangan. Adapun lingkungan eksternal meliputi lingkungan sosial masyarakat, pemerintah dan yayasan.

Mulyono (2019, hlm. 1) mengemukakan bahwa “analisis manajemen yang meliputi faktor internal maupun eksternal diperlukan saat sekolah melaksanakan siklus pemetaan mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan kegiatan utamanya adalah melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan cara mengisi instrumen pemetaan mutu menggunakan aplikasi pemetaan mutu.” Kegiatan ini menghasilkan rapor mutu yang menggambarkan capaian SNP di satuan pendidikan sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan sekolah. Hasil analisis rapor mutu inilah dikembangkan rencana pengembangan sekolah. Kegiatan analisis membutuhkan alat atau teknik analisis yang tepat. Dalam melakukan analisis yang lengkap sampai pada proses pengambilan keputusan yang rasional, logis dan dalam menentukan cara yang tepat, untuk mencapainya dibutuhkan beberapa alat analisis. Ada ragam alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan analisis manajemen. salah satu alat yang digunakan adalah teknik analisis *Strength Weakness, Opportunity* dan *Threats* (SWOT).

Masalah mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta, menurut analisa Sugiharto (2013, hlm. 247), diantaranya “persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Jumlah tenaga pengajar yang berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan masih sangat minim jumlahnya. Masalah lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata. Lebih lanjut

Sugiharto mengemukakan bahwa dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan maupun LKPI Bupati Purwakarta, penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan tersebut atau hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata.“

Temuan di atas menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan kontribusi sarana prasarana pendidikan dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Idealnya setiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai standar mutu yang ditetapkan, seperti tersedianya lahan yang cukup, gedung dan ruang yang layak serta perlengkapan pembelajaran yang memadai.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi sekolah di wilayah Kabupaten Purwakarta, masalah yang dapat diidentifikasi dalam tiga tahun terakhir mengenai ketersediaan sarana prasarana pendidikan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya lahan yang digunakan untuk pendidikan.
2. Adanya gedung yang kurang layak.
3. Kelas digunakan bergantian oleh 2 sekolah.
4. Perlengkapan belajar yang kurang memadai.
5. Kondisi geografis di Purwakarta pada umumnya berada di wilayah pedesaan dan pegunungan.
6. Belum tersedianya alat transportasi yang menunjang dari rumah penduduk menuju sekolah.
7. Banyaknya guru yang memilih sekolah di lokasi perkotaan.
8. Belum meratanya bantuan sarana pendidikan.

Temuan dan identifikasi masalah di atas menunjukkan bahwa sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Purwakarta belum sesuai dengan standar sarana prasarana pendidikan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya peningkatan mutu pendidikan. Proses belajar dan mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien bila didukung sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta menggunakan analisa SWOT, yaitu

*Strength Weakness, Opportunity Threats* dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.

Berdasarkan masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: ***“Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.”***

### **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pendidikan SMP di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana strategi pemenuhan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana prasarana pendidikan SMP di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk menganalisa strategi pemenuhan sarana prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan baik bagi pihak peneliti maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan (secara akademik). Secara lebih rinci kegunaan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritik**

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.
- b. Bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan dan implementasinya.
- b. Menambah wawasan bagi para pelaksana pendidikan mengenai pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.
- c. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai sesuai standar yang ditetapkan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari :

- Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II merupakan Kajian Pustaka, terdiri dari Landasan Teori, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Kerangka Berpikir.
- Bab III merupakan Metode Penelitian, terdiri dari Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Pengumpulan Data, dan Analisa Data.
- Bab IV merupakan Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian.
- Bab V merupakan Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.